

BAB II

PERAN STRATEGIS SUNGAI TIGRIS DAN EFRAT SERTA DINAMIKA HUBUNGAN NEGARA-NEGARA DI KAWASAN MESOPOTAMIA

Bab ini membahas peran strategis Sungai Tigris dan Efrat serta dinamika hubungan negara-negara di Kawasan Mesopotamia. Baik pada masa peradaban awal maupun peradaban modern. Pada sub bagian Mesopotamia Kuno akan dijelaskan pentingnya Sungai Tigris dan Efrat bagi perkembangan peradaban Bangsa Sumeria hingga Babilonia. Dilanjutkan dengan masa pendudukan Islam dibawah Kesultanan Abbasiyah dan Utsmaniyah. Sedangkan, pada sub bagian Mesopotamia Modern penjabaran akan difokuskan pada Turki, Suriah, dan Irak sebagai pemeran utamanya, dengan mengamati peran strategis Sungai Tigris dan Efrat serta dinamika hubungan antar tiga negara akibat penggunaan sumber air bersama.

2.1 Mesopotamia Kuno

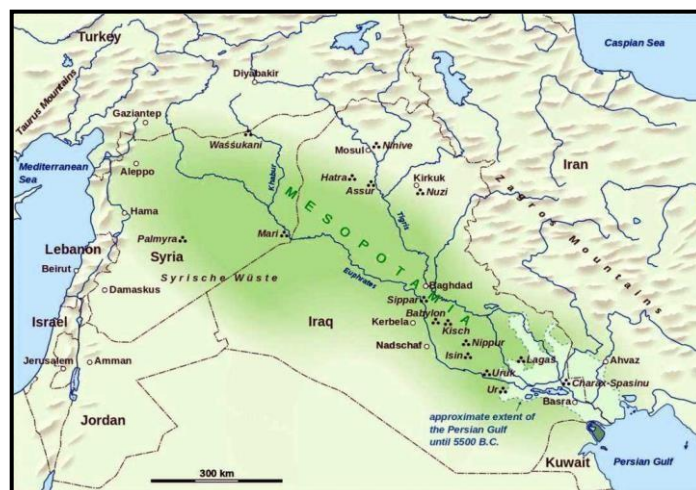
Keberadaan sungai sebagai sumber air, sejatinya menjadi daya tarik tersendiri bagi manusia. Sungai memiliki manfaat besar, mulai dari menyediakan air untuk dikonsumsi hingga menyediakan lahan subur yang dapat menopang ketersediaan pangan. Sungai Tigris dan Efrat memainkan peran tersebut bagi masyarakat Mesopotamia Kuno. Sungai Tigris dan Efrat menjadi sumber kehidupan dengan menyediakan air sebagai kebutuhan pokok. Manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok secara sadar akan berkumpul pada kawasan

sekitar sumber air. Hal ini kemudian mendorong terciptanya interaksi yang membentuk tatanan masyarakat.

2.1.1 Sumeria

Peradaban Mesopotamia berdiri sekitar tahun 3.500 SM. Bangsa Sumeria merupakan bangsa pertama yang tinggal di daerah itu. Mereka membentuk pemerintahan berupa negara-negara kota di sepanjang Lembah Sungai Tigris dan Efrat. Negara-negara kota tersebut, yakni Kish, Uruk, Ur, Sippar, Akshak, Larak, Nippur, Adab, Umma, Lagash, Bad-tibira, dan Larsa (lihat Gambar 2.1). Setiap negara kota tersebut terdiri atas kota bertembok dengan desa-desa serta lahan pertanian di sekelilingnya (Britannica, 2019: 1) dan masing-masing negara kota memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mengelola daerahnya (Manan, 2020: 201).

Gambar 2.1 Peta Wilayah Peradaban Mesopotamia



Sumber: Ancient Civilization-Mesopotamia Civilization
(<https://www.ancient-civilizations.com/mesopotamian-civilization/>)

Agrikultur merupakan penunjang utama kehidupan masyarakat Sumeria, maka dari itu ketersediaan air sangat diperhatikan oleh penguasa setiap negara kota. Sumber air mereka, Sungai Tigris dan Efrat, masalahnya adalah sungai musiman yang sulit diprediksi volume airnya. Normalnya, Sungai Tigris dan Efrat memiliki periode air tinggi pada bulan Maret hingga awal Mei. Namun, terkadang periode air tinggi masih terus terjadi hingga bulan November. Kondisi ini membahayakan sistem agrikultur mereka. Apabila periode air tinggi terus terjadi, maka banjir bisa saja melanda dan merusak atau memperlambat panen Musim Dingin serta mengganggu musim tanam di Musim Semi. Untuk mengatasinya, penguasa negara kota membangun tanggul dan pematang di sepanjang aliran sungai (Stahl, 2014: 3). Upaya itu membuat masyarakat Mesopotamia menjadi masyarakat pertama yang berhasil mengontrol volume air sungai menggunakan bendungan dan sistem irigasi untuk kebutuhan pangan (Angelakis dan Zheng, 2015: 456).

Keberhasilan Peradaban Mesopotamia dalam memanfaatkan dan mengontrol sumber daya air, ternyata mengakibatkan munculnya rasa kepemilikan atas sumber air pada negara-negara kota. Dengan kata lain, masing-masing penguasa negara kota berusaha melindungi dan menegaskan kekuasaan mereka atas perairan yang berada dalam wilayah mereka (Hansen, 2012: 13). Tak bisa dipungkiri bahwa kondisi itu dapat memicu konflik antar negara kota, sebab terjadi ketidaksetaraan akses air antara negara yang letaknya lebih tinggi dengan yang lebih rendah. Salah satu contoh konflik yang disebabkan oleh sumber daya air yang terjadi pada era Peradaban Mesopotamia adalah konflik antara Umma dan Lagash.

Konflik antara Umma dan Lagash adalah bukti perang perebutan wilayah dan air pertama yang tercatat dalam sejarah. Diceritakan konflik ini telah berlangsung selama beberapa generasi. Kedua negara kota tersebut memperebutkan sebuah daerah subur bernama Gu'edena yang diairi oleh Sungai Tigris melalui sebuah kanal di perbatasan antara negara kota Umma dan Lagash (Rost, 2017: 10; Sand, 2018: 98). Dalam tulisan milik Sand, Mesilim yang merupakan penguasa negara kota Kish mencoba menjadi arbiter untuk meredakan konflik antara keduanya. Mesilim mencoba mendamaikan dengan membuat sebuah traktat yang secara garis besar menyebutkan bahwa Umma dapat mengelola Gu'edena dengan catatan mereka harus membayar sewa tahunan pada Lagash.

Traktat itu bernama *Treaty of Mesilim*. Menurut traktat tersebut, sebagian wilayah Gu'edena memang berada di dalam perbatasan Lagash. Biaya sewa tahunan yang dibebankan ke Umma akan digunakan untuk pemeliharaan saluran irigasi serta kanal. Pada praktiknya, Umma acap kali menolak memberikan biaya sewa sehingga utang sewanya menumpuk (Sand, 2018: 98). Umma yang letaknya lebih tinggi daripada Lagash, juga melakukan praktik mengalihkan air sungai secara sepihak (Rost, 2017: 10). Konflik kembali pecah antara Umma dan Lagash. Konfrontasi militer membuat sejumlah saluran irigasi dan kanal rusak parah. Perang antara Lagash dan Umma akhirnya dimenangkan oleh Lagash, setelah dua kali Umma dikalahkan oleh pemimpin Lagash, yaitu Eanatum dan Enmetena. Sebagai konsekuensinya, Umma harus membiayai rekonstruksi saluran irigasi dan kanal yang hancur saat perang. *Treaty of Mesilim* kemudian diperbarui dan ditulis pada sebuah batu sebagai batas wilayah (lihat Gambar 2.2) (Sand, 2018: 98).

Gambar 2.2 Batu Memorial *Treaty of Mesilim*



Sumber: Mesopotamia 2550 B.C. : The Earliest Boundary Water Treaty (Sand, 2018: 98)

Konflik antara Lagash dan Umma, serta praktik penguasaan terhadap sumber air yang dilakukan oleh negara kota Bangsa Sumeria ini, secara tidak langsung menanamkan sebuah gagasan bahwa air adalah sumber kekuatan. Gagasan itu kemudian tertanam dan tumbuh dari generasi ke generasi, dan bukannya tidak mungkin praktik tersebut merupakan faktor kuat terciptanya politik air di kawasan Mesopotamia modern.

2.1.2 Babilonia

Hammurabi, penguasa Babilonia, sama halnya dengan penguasa-penguasa Mesopotamia lainnya, mencurahkan perhatian pada upaya pemanfaatan Sungai Tigris dan Efrat untuk agrikultur. Sudah tanggung jawabnya mengatur setiap negara kota agar mendapatkan cukup air untuk irigasi. Sebelumnya, peperangan sering terjadi antara negara kota di wilayah selatan Mesopotamia. Praktik pengalihan air Sungai Tigris dan Efrat melalui kanal secara pihak ditemukan kembali terjadi. Hal

ini berdampak buruk bagi negara-negara kota yang dianggap musuh oleh pihak lainnya, sebab pengalihan air dapat menyebabkan keringnya lahan pertanian mengingat iklim disana kering. Maka dari itu, Hammurabi menciptakan hukum untuk mengatur agrikultur dan irigasi yang tertuang dalam *Hammurabi Code* (Adamo dan Al-Ansari, 2020: 46).

Berikut merupakan bunyi pasal-pasal yang telah diterjemahkan dalam *Hammurabi Code* terkait pengaturan agrikultur dan irigasi:

- 1) *“If a man neglects to strengthen his dyke and does not strengthen it, and a break be made in his dyke, and the water carried away the farm-land, the man in whose dyke the break has been made shall restore the grain which he has damaged”* -Pasal 53 (Adamo and Al-Ansari, 2020: 46)
- 2) *“If a man opens his canal for irrigation and neglects it and the water damages adjacent field; he shall pay out grain on the basis of the area of adjacent field”* -Pasal 55 (Adamo and Al-Ansari, 2020: 47)
- 3) *“If a man opens up the water, and the water carries away the improvements of an adjacent field; he shall measure out ten Gur of grain per Gur lost”* - Pasal 56 (Adamo and Al-Ansari, 2020: 47)

Merujuk pada pasal-pasal yang telah disebutkan, Hammurabi melakukan upaya untuk mengefisiensi penggunaan air dari Sungai Tigris dan Efrat. Ia memperingatkan masyarakat Babilonia untuk merawat sarana agrikultur, seperti memperkuat tanggul dan saluran irigasi. Dari sini dapat dilihat masyarakat Babilonia selangkah lebih maju dari bangsa sebelumnya, sebab mereka tak hanya

mengatur aliran air sungai menggunakan irigasi dan kanal, tetapi juga berusaha menggunakan air secara tepat guna.

2.1.3 Abbasiyah

Kekhalifahan Abbasiyah berpusat di Baghdad yang letaknya berada di daerah hilir Sungai Tigris dan Efrat. Namun begitu, pusat pemerintahannya yang diapit oleh sungai besar tak selamanya membawa keuntungan. Posisi tersebut justru dapat menjadi kelemahan bagi pertahanan mereka. Hal ini terbukti dengan terjadinya peristiwa Pengepungan Baghdad atau *Siege of Baghdad*. Pengepungan Baghdad merupakan sebuah peristiwa yang menandai ditaklukkannya Kekhalifahan Abbasiyah oleh Kerajaan Mongol. Berbeda dengan uraian sebelumnya, bagian ini membahas bagaimana posisi pemerintahan yang berada di lokasi strategis juga memiliki sisi negatifnya.

Pengepungan Baghdad berawal dari rencana Mongke Khan, penguasa Kerajaan Mongol, untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Mongke memerintahkan saudara-saudaranya ke wilayah-wilayah yang telah ditargetkan. Salah seorang saudaranya yang bernama Hulagu Khan, mendapat titah agar mengomandani pasukan untuk menaklukkan wilayah Asia Tengah dan Barat, yang kemudian hari dikenal sebagai Armenia, Suriah, dan Irak (Karim, 2018: 196). Sebenarnya, Baghdad yang berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Abbasiyah bukanlah target utama penaklukan Hulagu. Instruksi yang diberikan oleh Mongke kepada Hulagu adalah menghancurkan benteng Hassasin di Alamut (Karim, 2018: 196). Hassasin sendiri merupakan kelompok pembunuh yang dicurigai mencoba

membunuh Mongke Khan. Di samping itu pula, Hassasin ini merupakan sekte Syiah Ismailiyah yang berusaha menggulingkan pemerintahan Sunni Kekhalifahan Abbasiyah. Secara tidak langsung, Kekaisaran Mongol dan Kekhalifahan Abbasiyah memiliki musuh yang sama. Baghdad baru menjadi sasaran Hulagu ketika Khalifah Al-Musta'sim mengabaikan permintaan Hulagu untuk mengirimkan bala bantuan dalam menghadapi Hassasin (Karim, 2018: 197).

Kekecewaan Hulagu pada Khalifah Al-Musta'sim yang mengabaikan permintaannya, mendorong terjadinya sebuah peristiwa tragis yang menandai kehancuran Kekhalifahan Abbasiyah. Disini, Sungai Tigris yang sebelumnya dijelaskan sebagai sumber kehidupan berubah menjadi senjata mematikan. Pada awal tahun 1258, Hulagu melancarkan sebuah strategi pengepungan terhadap Baghdad dengan cara menempatkan pasukannya di kedua sisi Sungai Tigris (Dokras, 2021: 26). Setelah berhasil melakukan pengepungan dengan menjepit Baghdad, Pasukan Mongol kembali memanfaatkan Sungai Tigris untuk mengalahkan Pasukan Abbasiyah dengan menjebol tanggul di sepanjang sungai tersebut dan menghancurkan kamp dan menenggelamkan ratusan Pasukan Abbasiyah (Buchstein dan Saunders, 2001: 132).

2.1.4 Utsmaniyah

Peran strategis Sungai Tigris dan Efrat pada masa Kesultanan Utsmaniyah tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya telah dijelaskan. Sungai Tigris dan Efrat berperan dalam sektor ekonomi, transportasi, perdagangan, sampai pertahanan, yang mana sektor-sektor tersebut saling berhubungan dan menguatkan.

Salah satu peran vital Sungai Tigris dan Efrat bagi Kesultanan Utsmaniyah adalah mempertahankan status quo di kawasan. Hal ini dilakukan dengan menjaga stabilitas keamanan. Selama kurang lebih 200 tahun, Sungai Tigris dan Efrat telah berkontribusi besar dalam menjaga dan mempertahankan Kesultanan Utsmaniyah dari rivalnya di perbatasan timur, yaitu Kekaisaran Safawi (Husain, 2021: 14).

Baghdad yang wilayahnya berada di paling timur menjadi benteng penting bagi Kesultanan Utsmaniyah. Dalam upaya memperkuat kekuatan benteng tersebut, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Aliran Sungai Tigris dan Efrat memberikan keunggulan kompetitif dan logistik bagi Kesultanan Utsmaniyah dibandingkan dengan rivalnya, Kekaisaran Safawi. Keunggulan yang didapatkan oleh Kesultanan Utsmaniyah sendiri berupa kemudahan menurunkan artileri berat, dengan memanfaatkan jalur transportasi Sungai Tigris dan Efrat (Husain, 2018:22). Hal ini merupakan kemudahan yang tidak dimiliki oleh Kekaisaran Safawi mengingat sebagian besar wilayahnya berupa dataran tinggi yang menyulitkan transportasi persenjataan (Husain, 2021: 33).

Selain kemudahan dalam menurunkan artileri berat, jalur transportasi Sungai Tigris dan Efrat juga berperan dalam tercukupinya kebutuhan pangan pasukan di benteng-benteng timur. Pengiriman surplus panen yang berpengaruh positif terhadap terpenuhi kebutuhan nutrisi pasukan, serta transfer senjata melalui Sungai Tigris dan Efrat dari pusat pemerintahan, menguatkan benteng-benteng pertahanan di sepanjang Sungai Tigris dan Efrat. Bahkan, benteng pertahanan di Sungai Tigris menjadi rumah bagi garnisun terbesar di perbatasan timur-tenggara (Husain, 2021: 49).

Benteng-benteng pertahanan tersebut, disamping menjaga perbatasan timur, juga mengirimkan pasukan-pasukan pendukung di tempat lain. Misalnya, Benteng Mosul yang memberikan dukungan pada resimen di Kirkuk yang letaknya dekat dengan kaki bukit Zagros, Benteng Baghdad yang mendukung di lokasi Samawa dan Benteng Basra yang mengirim pasukan dukungan di Qurna (Husain, 2021: 49). Peran Sungai Tigris dan Efrat sebagai jalur transportasi yang menguatkan pertahanan militer mereka dari serangan Kekaisaran Safawi pada akhirnya berpengaruh pula pada stabilitas keamanan Kesultanan Utsmaniyah.

2.2 Mesopotamia Modern

Era Mesopotamia modern dimulai setelah keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I. Keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah sendiri berdampak pada terpecah-pecahnya wilayah di Mesopotamia. Mengikuti Traktat Sévres tahun 1920, wilayah Mesopotamia yang sebelumnya dikuasai oleh Kesultanan Utsmaniyah, terbagi menjadi tiga bagian, yakni Turki, Suriah, dan Irak. Sebagai sumber air utama, peran Sungai Tigris dan Efrat tak bisa dilepaskan dari ekonomi-politik dalam negeri masing-masing negara. Lebih dari itu, Sungai Tigris dan Efrat juga mempengaruhi dinamika politik Turki, Suriah, dan Irak diranah internasional.

2.2.1 Peran Strategis Sungai Tigris dan Efrat dalam Ekonomi-Politik Dalam Negeri Turki

Berusaha bangkit setelah Perang Dunia I, Pemerintah Turki melihat industrialisasi menjadi jalan keluar dari masalah perekonomian. Industri dengan

mengeksploitasi sumber daya alam yang tersedia merupakan langkah awal yang ditempuh oleh Pemerintah Turki. Untuk menunjang rencana industrialisasi, Pemerintah Turki mendirikan *The Electric Works Study Administration (Elektrik İşlerik Etüt İdaresi)* dengan tujuan mempelajari serta mengevaluasi program pembangkit listrik sebagai penyedia daya kegiatan industri skala besar. Hasilnya mereka sangat tertarik pada Sungai Efrat sebagai sumber energi (Stahl, 2014: 78). Melalui *The Electric Works Study Administration* ide untuk membangun Bendungan Keban muncul, bendungan pertama milik Turki.

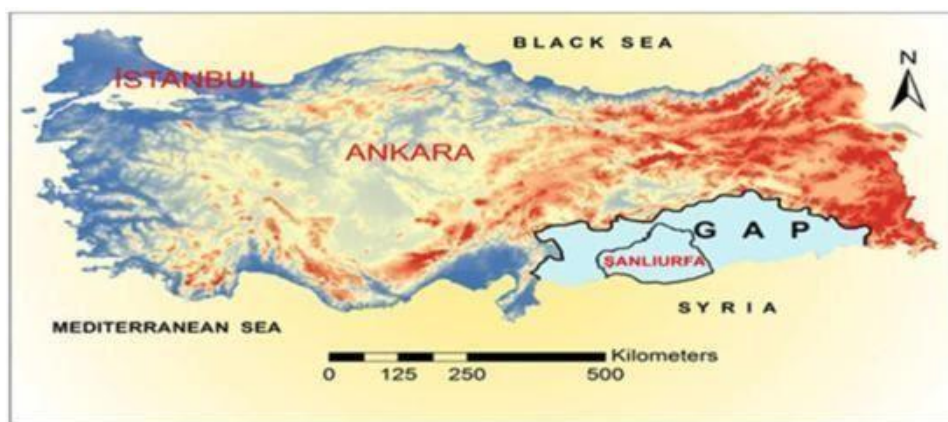
Melihat potensi Bendungan Keban, proyek pembangkit listrik ini akhirnya berkembang menjadi proyek pembangunan berkelanjutan. Proyek ini kemudian dimasukkan pada rencana pembangunan lima tahunan, dengan tujuan mendukung peningkatan perekonomian Turki, khususnya pada masyarakat Anatolia Tenggara dan Timur. Hal tersebut mengutip dari Laporan dari Komisi DSI pada tahun 1962 tepatnya di Bulan September, menjelaskan bahwa:

We earnestly desire the benefit to our country of this project by its quick realization. This project will play a large role in the social and economic development of Southeastern and Eastern Anatolia and as large a role in agricultural and industrial growth as in the question of our country's energy (Stahl, 2014: 92).

Turki membangun Bendungan Keban pada tahun 1965 di Sungai Efrat. Pembangunan tersebut sekaligus menandai masuknya babak baru hubungan negara tepi sungai dalam pemanfaatan sungai (Aydin dan Ereker, 2009: 608). Dengan memanfaatkan Sungai Efrat, Bendungan Keban dirancang agar mampu menghasilkan listrik sebanyak 6 miliar kWh listrik per tahun. Pembangunan Bendungan Keban seluruhnya selesai pada tahun 1974 (Korkutan, 2001: 18).

Namun, proyek pembangunan bendungan belum berakhir. Seperti yang telah disebutkan bahwa proyek Bendungan Keban direncanakan sebagai proyek pembangunan berkelanjutan. Proyek bendungan di Turki selanjutnya akan berada di bawah *Southeastern Anatolia Project (GAP)*.

Gambar 2.3 Letak Proyek GAP pada Peta Wilayah Turki



Sumber: Farmers' Attitudes to the Pricing of Natural Resources for Sustainability: GAP- ,Sanliurfa Sampling of Turkey (Aydogdu, 2019: 3)

Lokasi proyek ini sendiri bertempat di Anatolia Tenggara, sebuah wilayah yang berada di bagian timur Turki, tepatnya di sebelah tenggara, yang berbatasan dengan Suriah dan Irak. Anatolia Tenggara digambarkan sebagai wilayah yang masyarakatnya memiliki tingkat pendapatan rendah, kondisi alam yang tidak mendukung, sumber daya air yang tidak merata, serta layanan sosial yang tidak memadai. Hal ini menciptakan kesan negatif bagi wilayah barat Turki terhadap wilayah Anatolia Tenggara (Bilgen, 2018: 536). Kondisi sosial dan ekonomi wilayah Anatolia Tenggara yang tertinggal, tak lepas dari masalah Etnis Kurdi Turki yang tinggal di daerah tersebut. Sebesar 64,1% populasi Anatolia Tenggara

merupakan Etnis Kurdi yang telah lama memiliki ketegangan politik dengan pemerintah Turki (Bilgen, 2018: 535).

Keberadaan Etnis Kurdi menjadi salah satu masalah kompleks bagi Turki. Etnis Kurdi adalah etnis asli Mesopotamia yang tersebar di beberapa negara, sebagian besar dari etnis ini ditemukan di Turki, Irak, Suriah, dan Iran. Etnis Kurdi telah lama memiliki cita-cita untuk mendirikan negara mereka sendiri. Pada akhir Perang Dunia I, dalam Traktat Sèvres (1920), salah satunya disebutkan memberikan Etnis Kurdi otonomi Kurdistan. Mustafa Kemal Atatürk, *founding fathers* Republik Turki (Turki modern), bahkan sempat mengusulkan pendirian kotamadya untuk Etnis Kurdi dengan pemberian kebebasan untuk memilih pemimpinnya sendiri (Ozkahraman, 2017: 412). Sayangnya, dalam Traktat Lausanne (1923), yang mana menggantikan traktat sebelumnya, masalah pemberian otonomi tersebut tidak disebutkan (Bilgen, 2018a: 96). Ketegangan politik antara Etnis Kurdi dan pemerintah Turki pun tak terhindarkan.

Dalam upaya mencegah timbulnya ancaman dari Etnis Kurdi, Atatürk memberlakukan kebijakan khusus pada wilayah Anatolia Tenggara. Pemerintah Turki mengabaikan pembangunan pada wilayah tersebut. Membiarkan wilayah Anatolia Tenggara tertinggal bila dibandingkan dengan wilayah Turki di bagian barat (Ozkahraman, 2017: 413). Pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah Turki, justru membangkitkan gerakan perlawanan oleh Etnis Kurdi, yang ditandai dengan berdirinya Partai Pekerja Kurdistan (PKK, Partiya Karkerên Kurdistan). Tujuan mereka tak lain mewujudkan cita-cita mereka mendirikan negara Kurdistan yang

merdeka. PKK melakukan operasi gerilya melawan pemerintah Turki dan seringkali melakukan aksi terorisme (Britannica, 2021b: 1).

Melihat ancaman ini, pemerintah Turki percaya bahwa cara untuk mengatasinya adalah dengan menyelesaikan masalah sosial ekonomi di Anatolia Tenggara yang selama ini mereka abaikan (Ozkahraman, 2017: 413). GAP, yang memanfaatkan Sungai Tigris dan Efrat ini, tak sekadar proyek hidrologi untuk pembangkit listrik dan irigasi, melainkan sebuah skema modernisasi dan transformasi sektor politik, sosial, dan ekonomi di wilayah timur-tenggara Turki (Bilgen, 2018b: 95). Dengan adanya pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Anatolia Tenggara, diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara wilayah timur-tenggara Turki dengan wilayah lainnya, sehingga dapat memupuk loyalitas masyarakat Anatolia Tenggara pada Turki dan berhenti mendukung PKK.

Selain dalam rangka memperoleh loyalitas dari masyarakat Anatolia Tenggara, Joost Jongerden dalam tulisannya yang berjudul *Dams and Politics in Turkey: Utilizing Water, Developing Conflict* menariknya menyebutkan, pembangunan GAP pada Anatolia Tenggara sejatinya juga merupakan strategi penghapusan kultur Kurdi di wilayah tersebut (Jongerden, 2010: 141). Isu ini mendapatkan sorotan internasional karena Turki melakukan pengembangan GAP pada wilayah yang menjadi bagian dari peninggalan budaya kuno serta tempat tinggal bagi masyarakat Etnis Kurdi dari generasi ke generasi. Bendungan Ilisu yang menjadi bagian dari GAP di Sungai Tigris, pada tahun 2019 lalu setidaknya telah memaksa lebih dari 70.000 orang meninggalkan Hasankeyf. Tak hanya itu, proyek Bendungan Ilisu perlahan akan menenggelamkan kota yang menyimpan

sejarah peradaban kuno Bizantium, Romawi, dan Kesultanan Utsmaniyah (The Washington Post, 2019: 1).

2.2.2 Peran Strategis Sungai Tigris dan Efrat dalam Ekonomi-Politik Dalam Negeri Suriah

Suriah merupakan negara tepi Sungai Tigris dan Efrat yang letaknya berada di bagian tengah daerah aliran sungai, tepatnya di bawah Turki dan di atas Irak. Letak geografis tersebut membuat sungai yang mengalir di wilayah Suriah memiliki peran besar dalam mendukung kehidupan masyarakat disana, mulai dari sektor ekonomi, energi, hingga kepentingan politik. Tak jauh berbeda dengan Turki, Suriah mulai mengeksploitasi sungai sekitar tahun 1960-an dengan memfokuskan proyek hidrologinya pada Sungai Efrat. Di sepanjang aliran Sungai Efrat, Suriah memiliki tiga bendungan besar, yakni Tabqa, Baath, dan Tishreen. Sementara itu, Suriah kurang bisa memaksimalkan pemanfaatan Sungai Tigris, dikarenakan letak sungainya yang tak sepenuhnya berada di wilayah Suriah.

Tabqa merupakan bendungan terbesar sekaligus terpenting di Suriah. Tabqa selesai dibangun pada tahun 1973. Pembangunan bendungan ini ditujukan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air serta mengairi lahan pertanian (Rosner, 2016: 30). Untuk memaksimalkan kinerja Tabqa, Bendungan Baath dan Tishreen dibangun dengan fungsi yang serupa. Baath selesai dibangun pada 1986. Meskipun memiliki fungsi yang serupa dengan Tabqa, tujuan dibangunnya Baath lebih kepada menunjang fungsi Tabqa. Lain halnya dengan Tishreen yang selesai dibangun pada tahun 1999. Tishreen selain digunakan untuk membantu Tabqa, Tishreen

berkontribusi cukup besar dalam menyumbang energi listrik dari air (Adamo, Al-ansari dan Sissakian, 2020: 51)

Dalam pemanfaatan sungai untuk penghasil energi listrik, Sungai Efrat berperan sebagai penghasil listrik bagi Suriah sebesar 13,80%. Bendungan Tabqa setidaknya berkontribusi sebesar 10% dari total produksi listrik melalui proyek hidrologi (Ismail, Nasser dan Marzouk, 2019: 44). Jumlah yang dihasilkan dari energi air tak seberapa besar bila dibandingkan dengan energi listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, seperti gas alam dan minyak bumi. Hal ini tentu dipengaruhi oleh Suriah yang merupakan negara penghasil minyak (Rosner, 2016: 40).

Namun, peran Sungai Efrat menjadi sangat penting bagi Suriah di sektor agrikultur. Agrikultur memainkan peran kunci dalam perekonomian dan keamanan nasional Suriah. Dalam perekonomian Suriah, agrikultur merupakan salah satu pilar ekonomi Suriah bahkan sejak dibawah Mandat Prancis. Sektor ini menyumbang 23% terhadap pertumbuhan ekonomi Suriah (Ismail, Nasser dan Marzouk, 2019: 20). Meski sektor minyak memimpin perekonomian, agrikultur tetap menjadi perhatian bagi Suriah. Masih banyak masyarakat yang tidak pernah mengenal pekerjaan lain selain bertani atau memiliki keahlian alternatif untuk memperoleh pekerjaan lainnya (Rosner, 2016: 16-17). Disamping itu, mencapai swasembada pangan juga merupakan tujuan dari Suriah.

Pentingnya agrikultur dalam perekonomian Suriah berdampak pula pada keamanan nasional mereka. Hal ini berhubungan dengan ketegangan antara etnis

mayoritas dan etnis minoritas yang berada disana. Suriah sejatinya adalah negara yang memiliki penduduk beragam identitas. Namun, sejak masa Kesultanan Utsmaniyah, Muslim Sunni merupakan kelompok dominan di Suriah. Jumlah populasi masyarakat Muslim Sunni di Suriah diperkirakan sekitar 74% yang terdiri atas etnis Arab, Kurdi, Sirkasia, Chechnya, dan Turkoman. Sedangkan sisanya merupakan kelompok minoritas seperti Muslim Alawi, Syiah, Druze, serta Kristen (U.S DEPARTEMENT OF STATE, 2020: 3 ; Britannica, 2021c: 1).

Terlepas dari Muslim Sunni sebagai kelompok mayoritas, setelah jatuhnya Kesultanan Ustmaniyah, Mandat Prancis mulai memberikan perhatian kepada Kelompok Alawi yang sebelumnya termarginal hingga sekarang menjadi kelompok yang memimpin di Suriah (Abosedra, Fakih dan Haimoun, 2020). Dominasi oleh kelompok minoritas Alawi tidak disambut hangat oleh Muslim Sunni, pun oleh kelompok minoritas lainnya.

Untuk menjaga hubungan antar kelompok serta meningkatkan kesetiaan mereka terhadap rezim Alawi, pemerintah Suriah berusaha memenuhi kebutuhan sosial ekonomi mereka. Masyarakat Muslim Sunni sendiri kebanyakan bekerja pada sektor agrikultur yang mana peran Sungai Efrat sebagai sumber air sangat diandalkan. Sudah tugas pemerintah Suriah untuk memastikan bahwa volume aliran air Sungai Efrat cukup untuk kegiatan pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Suriah dalam kancah regional Sungai Tigris dan Efrat selalu menekankan pembagian volume air yang jelas untuk masing-masing negara tepi sungai (Korkutan, 2001: 58).

2.2.3 Peran Strategis Sungai Tigris dan Efrat dalam Ekonomi-Politik Dalam Negeri Irak

Irak terletak di hilir Sungai Tigris dan Efrat, membuat wilayahnya dikenal sebagai Lembah Mesopotamia, tempat lahirnya salah satu peradaban tertua dunia. Peradaban Lembah Mesopotamia terkenal akan sistem irigasinya. Lokasinya yang berada di dekat sumber air, menarik manusia yang kala itu sudah mulai mengenal bercocok tanam menetap di sana. Hingga saat ini, Sungai Tigris dan Efrat memegang peran penting sebagai sumber air bagi Irak. Mulai dari pembangkit listrik, keperluan irigasi, hingga keamanan nasional.

Dalam sektor energi listrik, tak jauh berbeda dengan Suriah, sebagian besar energi listrik yang dimiliki oleh Irak berasal dari bahan bakar fosil. Produksi energi listrik yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil hampir mencapai 80% (Ahmad-Rashid, 2017: 633). Namun demikian, Irak juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga air mengingat permintaan akan energi listrik yang terus meningkat, sedangkan bahan bakar fosil sifatnya tidak dapat diperbarui. Untuk itu, pemerintah Irak membangun proyek bendungan yang fungsinya selain mengontrol dan menampung air untuk irigasi, juga berperan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Bendungan Mosul dan Bendungan Haditha merupakan bendungan terbesar di Irak yang mana dilengkapi dengan stasiun pembangkit listrik tenaga air. Dalam menghasilkan listrik, Bendungan Mosul memanfaatkan Sungai Tigris, sedangkan Bendungan Haditha memanfaatkan Sungai Efrat (Abdullah, Al-Ansari dan Laue, 2019: 132). Melalui pembangkit listrik tenaga air ini, Sungai Tigris dan Efrat

berkontribusi memberikan 9,22% energi listrik bagi Irak (Ahmad-Rashid, 2017: 633).

Peran Sungai Tigris dan Efrat bagi Irak selanjutnya dapat ditemukan pada sektor agrikultur. Pentingnya sektor agrikultur bagi Irak sendiri hampir sama kondisinya dengan Suriah. Sektor agrikultur merupakan penyumbang GDP terbesar bagi Irak setelah sektor minyak, dengan mempekerjakan 20% total populasi di Irak terutama pada masyarakat di pedesaan. (Al-Ansari, Ali Abed dan Ewaid, 2021: 226-227). Terlebih lagi, swasembada pangan merupakan visi Irak (Scheumann, 2013: 284). Tentunya, air yang berasal dari Sungai Tigris dan Efrat berdampak langsung pada sektor ini. Apabila pemerintah Irak tak bisa mencukupi permintaan air untuk sektor agrikultur, hal tersebut dapat menyebabkan gagal panen yang nantinya akan menimbulkan kerugian bagi petani. Gagal panen juga dapat berdampak pada kurangnya pasokan makanan bagi masyarakat Irak yang pada akhirnya membuat Irak harus mengimpor pangan demi mencukupi kebutuhan masyarakat.

Masalah sumber air yang berdampak pada sektor agrikultur juga dapat mempengaruhi keamanan dalam negeri, yang mana kondisi tersebut dipengaruhi oleh ketegangan antara etnis mayoritas yang dipimpin oleh etnis minoritas. Menurut Korkutan (2001), situasi yang terjadi di Irak, pada dasarnya serupa dengan situasi yang terjadi di Suriah. Irak merupakan negara yang beragam dengan mayoritasnya merupakan kelompok penganut Muslim Syiah. Namun, Irak sendiri dipimpin oleh kelompok Muslim Sunni. Sebagian besar masyarakat Muslim Syiah tinggal di bagian selatan Irak, di sepanjang Sungai Tigris dan Efrat. Hal ini membuat masyarakat Syiah sangat bergantung pada sumber air Sungai Tigris dan Efrat untuk

pertanian. Ketidakmampuan pemerintah Muslim Sunni untuk memenuhi permintaan air bisa saja dijadikan alasan Muslim Syiah menentang pemerintah (Korkutan, 2001: 68).

2.2.4 Dinamika Hubungan Turki, Suriah, dan Irak Terkait Penggunaan Sumber Air Bersama di Sungai Tigris dan Efrat

Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pasca berakhirnya Perang Dunia I telah melahirkan Turki, Suriah, dan Irak sebagai negara yang memiliki otoritasnya masing-masing. Pecahnya Kesultanan Utsmaniyah juga turut membagi kepemilikan Sungai Tigris dan Efrat kepada tiga negara tersebut. Untuk menjaga hubungan antara negara tepi Sungai Tigris dan Efrat, Turki, Suriah dibawah mandat Prancis dan Irak dibawah mandat Inggris membuat beberapa Perjanjian terkait manajemen pemanfaatan bersama sumber air, yakni:

a. *The Franco-British Convention 1920*

The Franco-British Convention merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Prancis dan Inggris sebagai mandat bagi beberapa negara baru yang lahir pasca Perang Dunia I. Dalam perjanjian ini, salah satunya memuat pengaturan pemanfaatan Sungai Tigris dan Efrat, yang mana apabila Suriah dibawah mandat Prancis berniat membuat perencanaan irigasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Tigris dan Efrat, maka pemerintah mandat Prancis wajib membentuk komisi untuk mengevaluasi dampak yang ditimbulkan dari rencana irigasi Suriah terhadap jumlah aliran

air Sungai Tigris dan Efrat yang masuk ke wilayah mandat Inggris, seperti Irak (Kirschner dan Tiroch, 2012: 342).

b. *Treaty of Ankara* 1921

Treaty of Ankara 1921 atau *Franco-Turkish Agreement of Ankara* adalah perjanjian yang mengakhiri perang Prancis dan Turki serta mendorong hubungan baik antara kedua belah pihak. Perjanjian ini ditandatangani oleh Prancis dan Turki pada 20 Oktober 1921. Di dalamnya terdapat pasal yang mengatur mengenai distribusi air Sungai Efrat, yaitu Pasal XII yang menyebutkan bahwa, "Kota Aleppo juga dapat mengatur pasokan air dari Sungai Efrat di wilayah Turki dengan biaya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan airnya" (Kibaroglu *et al.*, 2013: 66).

c. *Lausanne Peace Treaty* 1923

Lausanne Peace Treaty merupakan perjanjian damai pada Perang Dunia I yang ditandatangani oleh Kesultanan Utsmaniyah dan Blok Sekutu pada 24 Juli 1923. Dalam perjanjian ini, salah satunya menyebutkan pada Pasal 109 bahwa sebelum melakukan proyek hidrologi apapun di Sungai Tigris dan Efrat, Turki harus berkonsultasi dengan Irak sebagai negara hilir sungai (Al-Ansari, 2019: 53).

d. *Treaty of Friendship and Good Neighbourly Relations* 1946

Treaty of Friendship and Good Neighbourly Relations adalah perjanjian antara Turki dan Irak yang ditandatangani pada 1946. Perjanjian ini menekankan urgensi untuk membangun sistem pengendali banjir, yang mana kedua belah pihak sepakat untuk mendirikan di Turki dengan

seluruh biaya ditanggung oleh Irak. Di samping itu, akan dibangun pula tempat pengamatan permanen yang akan didanai oleh kedua belah pihak secara setara. Sedangkan untuk pemeliharaan dan pengoperasian akan dilakukan oleh Turki. Dalam traktat ini juga disebutkan bahwa Turki akan memberikan pemberitahuan pada Irak apabila terdapat rencana pembangunan sistem irigasi atau pembangkit listrik tenaga air untuk selanjutnya dinegosiasikan secara terpisah (Scheumann, 2013: 283).

Adanya perjanjian-perjanjian terkait pemanfaatan bersama sumber air Sungai Tigris dan Efrat antara ketiga negara tepi sungai, telah menciptakan pola hubungan harmoni. Namun, bila ditelaah lebih dalam, keberhasilan perjanjian-perjanjian yang telah dijelaskan dalam menjaga hubungan antar ketiga negara ini, juga didukung oleh kondisi bahwa ketiga negara saat itu belum terlalu berfokus pada upaya eksplorasi dan eksploitasi air di Sungai Tigris dan Efrat. Pada periode 1920-1960an, pemanfaatan Sungai Tigris dan Efrat bagi ketiga negara masih terbatas pada urusan irigasi. Pada waktu itu pula, lahan pertanian yang perlu diairi pun belum seluas setelah tahun 1960an, dimana telah terjadi lonjakan pertumbuhan penduduk di ketiga negara. Lonjakan penduduk pada tahun 1960 ini nantinya yang akan mempengaruhi ketiga negara untuk memperluas pemanfaatan Sungai Tigris dan Efrat pada berbagai sektor. Turki mulai menginisiasi pembangunan proyek hidrologi berkelanjutan bernama *Southeastern Anatolia Project (GAP)*, Suriah mulai membangun bendungan pertama mereka, Bendungan Tabqa, dan Irak sendiri yang letaknya berada di hilir sungai pun sedang membangun Bendungan Haditha. Tindakan negara hulu dan tengah Sungai Tigris dan Efrat, yaitu Turki dan

Suriah, untuk mengembangkan proyek hidrologi merupakan latar belakang utama munculnya dilema pembagian air di sana.

Pembangunan Bendungan Keban (1966) dan Karakaya (1976) oleh Turki adalah salah satu pemicu awal munculnya masalah pembagian air. Keban dan Karakaya merupakan bendungan yang diperuntukkan sebagai pembangkit listrik. Untuk itu, Turki selain harus menahan volume air sungai dalam proses pengisian, pihaknya juga harus menjamin jumlah volume air yang tetap agar turbin mereka bekerja secara efektif. Letak Turki yang berada di hulu sungai sangat berpengaruh pada jumlah volume air yang akan diterima oleh negara tepi sungai lainnya. Belum lagi Suriah yang mengikuti jejak Turki dengan membangun Bendungan Tabqa pada awal 1960-an. Maka dari itu, diperlukan diskusi antar tiga negara tepi sungai.

Munculnya rencana proyek pembangunan bendungan di Sungai Efrat ini pada awal 1960-an, membuat ketiga negara memutuskan mengadakan diskusi pada 1965 dalam kerangka bernama *Joint Technical Committee (JTC)*. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi teknis terbaru terkait pembangunan bendungan di tiap-tiap negara. Pada pertemuan itu juga menyinggung masalah pembagian air di Sungai Efrat, dimana masing-masing negara tepi sungai mengajukan permintaan jumlah volume air maksimal yang mereka inginkan (Kirschner dan Tiroch, 2012: 345). Irak mengajukan sebesar 14 miliar m³/tahun, Suriah 13 miliar m³/tahun, dan Turki dengan 18 miliar m³/tahun (Al-Ansari, 2019: 54). Pengajuan permintaan jumlah volume air maksimal Sungai Efrat yang diterima tiga negara tepi sungai ini, nyatanya, melebihi jumlah total volume air Sungai Efrat per tahun. Meski telah dilakukan pembicaraan sebanyak 22 kali, tidak ada

perjanjian pembagian air yang tercapai pada pertemuan tersebut. Namun begitu, pembangunan Keban dan Tabqa tetap dilakukan.

Mengingat rencana pembangunan bendungan terus dijalankan terlepas dari ketiadaan perjanjian pembagian air, Suriah dan Irak sebagai negara yang terletak pada bagian Sungai Efrat yang lebih rendah dari Turki, menuntut Turki menjamin aliran air Sungai Efrat sebesar minimal 350 m³/detik selama periode pengisian Bendungan Keban (Aydin dan Ereker, 2009: 608). Awalnya, Turki belum bisa memutuskan apakah mereka sanggup memenuhi tuntutan yang diajukan. Namun begitu, Turki akhirnya menyanggupi tuntutan Suriah dan Irak. Hal ini dilakukan guna memenuhi syarat pengajuan bantuan pembangunan internasional yang diberikan oleh Amerika Serikat (*U.S. Agency for International Development / USAID*) untuk menyelesaikan bendungan tersebut (Kut, 1993: 4).

Meski sudah ada upaya dalam mencegah kekurangan air pada daerah di hilir sungai, di tahun 1975 terjadi krisis antara Suriah dan Irak akibat berlangsungnya periode penahanan Sungai Efrat oleh Turki untuk mengisi Bendungan Keban dan Suriah untuk mengisi Bendungan Tabqa. Sebelumnya, Suriah sepakat untuk memasok air ke Irak sebanyak 200 juta meter kubik dari pengisian Bendungan Tabqa. Nyatanya, Suriah tak mampu menepatinya dengan alasan bahwa pihaknya bahkan tidak menerima setengah dari aliran normal yang seharusnya mereka dapatkan dari Turki (Al-ansari, 2016: 152).

Kondisi yang terjadi sangat merugikan Irak sebagai negara hilir sungai. Irak menyalahkan Suriah atas berkurangnya volume air pada tingkat yang sudah tidak dapat ditoleransi lagi, sedangkan Suriah sendiri juga mengalami penurunan jumlah

volume air dari Turki. Respon yang diberikan oleh Suriah sama sekali tidak memuaskan Irak. Setahun sebelumnya, Suriah telah mendapatkan ancaman dari Irak, yang mana apabila Suriah terus memangkas jumlah volume air Sungai Efrat yang masuk ke Irak, maka Irak tak segan-segan menjatuhkan bom ke Bendungan Tabqa. Tak hanya itu, Irak juga mengancam akan menurunkan pasukan militernya di sepanjang perbatasan (Gleick, 1994: 13).

Frustrasi dengan situasi yang terjadi pada periode kekeringan, Irak kembali mengancam Suriah. Kali ini, Suriah dan Irak benar-benar hampir terlibat konflik terbuka. Pada 13 Mei 1975, Suriah menutup ruang udaranya bagi semua pesawat milik Irak serta menanggukkan semua penerbangan ke Irak yang kemudian disusul oleh kabar penurunan pasukan di sepanjang perbatasan Irak (Gleick, 1994: 13). Beruntungnya, pecah konflik dapat dicegah berkat dimediasi oleh Arab Saudi dan berujung pada kesepakatan Suriah akan memberikan tambahan air pada Irak (Scheumann, 2013: 287).

Setahun setelah Konflik Suriah dan Irak berlalu, Turki kembali membangun sebuah bendungan bernama Bendungan Karakaya. Irak sekali lagi menjadi pihak yang paling tidak diuntungkan. Berada diposisi tersebut, Irak menekan Turki dengan cara memangkas kuota ekspor minyak Irak ke Turki pada tahun 1977 (Aydin dan Ereker, 2009: 608). Pemangkasan kuota ekspor minyak oleh Irak baru dicabut ketika Turki memutuskan akan menjamin aliran Sungai Efrat pada Suriah dan Irak sebesar $500 \text{ m}^3/\text{detik}$. Pemberian jaminan volume air ini juga didorong oleh rencana Turki untuk mendapatkan skema bantuan dari Bank Dunia (Kut, 1993:5).

Kekhawatiran Suriah dan Irak bertambah ketika Turki mulai menjalankan proyek GAP mereka pada tahun 1977. Proyek tersebut jelas akan sangat mempengaruhi jumlah volume aliran air sungai akibat peningkatan konsumsi air oleh Turki. Hal ini kian menguatkan tuntutan Suriah dan Irak kepada Turki, yang mana sama-sama sedang mengembangkan proyek hidrologi untuk menetapkan pembagian jumlah volume air Sungai Tigris dan Efrat. Dalam upayanya, Suriah dan Irak bahkan memobilisasi seluruh Arab untuk menggagalkan pendanaan Bank Dunia terhadap proyek GAP. Pada akhirnya, Turki terpaksa mendanai sendiri proyek GAP akibat ketidakmampuan Turki memenuhi syarat dari Bank Dunia untuk membuat perjanjian komprehensif dengan negara-negara tepi sungai lainnya (Aydin dan Ereker, 2009: 610).

Kompleksnya masalah air antara tiga negara tepi sungai kembali berusaha diurai dengan melakukan dialog pada tahun 1980, melalui *Joint Technical Committee* yang diinisiasi oleh Turki dan Irak. Diskusi melalui kerangka *Joint Technical Committee* ini awalnya hanya antara Turki dan Irak saja. Suriah baru bergabung pada tahun 1983. Penyelesaian masalah air menjadi agenda pembahasan dalam *Joint Technical Committee*, termasuk didalamnya membahas pembangunan Bendungan Ataturk yang merupakan bagian dari proyek GAP Turki (Kibaroglu *et al.*, 2013: 70). Tujuan dari adanya *Joint Technical Committee* sendiri adalah mengidentifikasi metode alokasi air yang tepat bagi ketiga negara tepi Sungai Tigris dan Efrat. Namun, setelah melakukan 16 kali pertemuan, ketiga negara belum berhasil mencapai kata sepakat dalam menentukan pemanfaatan penggunaan air secara bersama (Kirschner dan Tiroch, 2012: 348).

Salah satu bentuk usulan untuk menyelesaikan masalah pembagian air antara ketiga negara dalam kerangka diskusi ini, adalah skema pembagian air yang diajukan oleh Turki pada tahun 1983. Skema tersebut menyarankan pengalokasian air yang mana menyesuaikan kebutuhan masing-masing negara berdasarkan manfaat yang didapatkan dari jumlah air yang didapatkan. Selain itu, Turki juga menegaskan pentingnya penggunaan teknologi mumpuni dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air (Aydin dan Ereker, 2009: 611). Usulan Turki ditolak oleh Suriah dan Irak yang lebih menginginkan jumlah pembagian air secara merata.

Pada tahun 1993, *Joint Technical Committee* dihentikan tanpa membuahkan hasil. Kegagalan ketiga negara dalam upaya menyelesaikan masalah pemanfaatan dan pembagian air melalui kerangka tersebut, disebabkan oleh kesulitan dalam menentukan definisi pokok bahasan. Pokok bahasan yang dimaksud seperti apakah Sungai Tigris dan Efrat merupakan satu sistem serta perbedaan pendekatan mengenai status Sungai Tigris dan Efrat, dimana Turki menganggap Sungai Tigris dan Efrat sebagai sungai lintas batas negara atau *transboundary river*. Sedangkan, Suriah dan Irak berpendapat Sungai Tigris dan Efrat merupakan sungai internasional (Kibaroglu *et al.*, 2013: 71).

Stagnannya perundingan trilateral pada *Joint Technical Committee* membuat ketiga negara memilih untuk melakukan perjanjian bilateral sebagai jalan keluar dari masalah pembagian air. Perjanjian bilateral yang pernah dilakukan antar ketiga negara diantaranya, seperti *The Protocol of 1987 between Turkey and Syria* dan *The Protocol of 1989 between Syria and Iraq* yang disepakati untuk menyelesaikan masalah penyelesaian Bendungan Ataturk.

a. *The Protocol of 1987 between Turkey and Syria*

Perjanjian Bilateral Turki dan Suriah tahun 1987 merupakan perjanjian bilateral pertama yang berkaitan dengan pembagian air di kawasan tersebut. Perjanjian ini adalah hasil dari perundingan antara Turki dan Suriah dalam *Joint Economic Commission* yang dilaksanakan pada 17 Juli 1987 (Kibaroglu *et al.*, 2013: 71). Dalam perjanjian tersebut, pada Pasal 6 disebutkan bahwa Turki berjanji memberikan 500 m³/detik aliran Sungai Efrat setiap tahunnya selama periode penyelesaian Bendungan Atatürk (Aydin dan Ereker, 2009:611). Perjanjian Bilateral antara Turki dan Suriah tahun 1987 juga punya posisi penting dalam masalah keamanan, dimana dengan adanya perjanjian ini, Suriah menghentikan dukungan mereka pada PKK untuk menyerang proyek GAP Turki. Namun, karena tidak melibatkan Irak dalam perjanjian, yang mana sebelumnya memberikan ijin pada Turki untuk menyerang PKK di wilayahnya, perjanjian ini membuat Irak melarang keras Turki menyerang PKK di wilayahnya. Malahan, pada tahun 1988 Irak menekan orang-orang Kurdi di wilayah mereka sehingga sebanyak 60.000 orang Kurdi melarikan diri ke Turki. Tentunya, kejadian tersebut memperburuk hubungan antara Turki dan Irak (Al-Ansari *et al.*, 2018: 202).

b. The Protocol of 1989 between Syria and Iraq

Perjanjian Bilateral Suriah dan Irak tahun 1989 disepakati pada 16 April 1989 di Kota Baghdad. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk membagi aliran Sungai Efrat dengan Suriah mendapatkan 42% dan Irak mendapatkan 58% dari total aliran air Sungai Efrat yang diterima oleh Suriah (Kirschner dan Tiroch, 2012: 348).

Perlu diingat bahwa perjanjian bilateral yang telah disepakati hanya berlaku pada kasus pengisian Bendungan Atatürk saja. Artinya perjanjian terkait jumlah alokasi pembagian air sifatnya hanya sementara belaka. Perjanjian bilateral ini mengalami keretakan saat Turki dan Suriah bergabung pada koalisi Amerika Serikat saat Perang Irak-Kuwait meletus pada tahun 1990 (Aydin dan Ereker, 2009: 612). Langkah Turki dan Suriah kian memperkeruh hubungannya dengan Irak. Pun dengan hubungan Turki dan Suriah sendiri dengan kembali berlanjutnya dukungan Suriah pada gerakan PKK di Turki. Kondisi ini kemudian berdampak pada sulitnya mencapai Perjanjian masalah pembagian air.

Akhir dekade tahun 1990-an, pembahasan mengenai masalah pembagian air mulai dilakukan kembali. *Turkish-Syrian Ceyhan Security Agreement* pada Oktober 1998 membuka jalan bagi ketiga negara untuk menyelesaikan masalah pembagian air melalui jalan trilateral. *Ceyhan Security Agreement* merupakan perjanjian damai antara Turki dan Suriah, dimana Suriah berjanji untuk menghentikan dukungan pada PKK sepenuhnya yang ditandai dengan diserahkannya pemimpin PKK Abdullah Ocalan pada 1999. Berawal dari membaiknya hubungan Turki dan

Suriah, tak lama setelah penandatanganan perjanjian tersebut, Suriah mengusulkan dilakukannya kembali *Joint Technical Meeting* untuk membahas masalah air (Scheumann, 2013: 289).

Memasuki tahun 2000-an, hubungan ketiga negara tepi sungai perlahan kembali membaik. Dimulai dengan membaiknya hubungan Turki dan Suriah melalui *Ceyhan Security Agreement* yang kemudian berlanjut pada pembicaraan mengaktifkan lagi *Joint Technical Meeting* pada tahun 1999. Di tahun 2001, keduanya menandatangani Perjanjian lagi antara *GAP'S Regional Development Administration* dibawah pemerintahan Turki dan *General Organization for Land Development* dibawah pemerintahan Suriah, untuk berdialog mengenai pemanfaatan berkelanjutan sumber daya tanah dan air (Kibaroglu *et al.*, 2013: 73-74), yang diwujudkan melalui kerjasama teknis seperti program pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan program bersama, serta melakukan pertukaran informasi (Kirschner dan Tiroch, 2012: 350). Sifat kerjasama yang cenderung kearah teknis ini, pada akhirnya tidak meningkatkan kemajuan signifikan terkait penyelesaian masalah pembagian air.

Beranjak ke tahun 2008, arah kebijakan politik luar negeri Turki mulai menggandeng Suriah dan Irak. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari penandatanganan *Joint Political Establishment of the High-Level Strategic Cooperation Council* (HSCC) oleh Turki dan Irak serta Turki dan Suriah. *Joint Political Establishment of the High-Level Strategic Cooperation Council* (HSCC) bertujuan untuk memperluas jangkauan kerjasama pada sektor sosio-ekonomi,

termasuk masalah air didalamnya, seperti pengembangan proyek, manajemen, serta penggunaan air (Kibaroglu *et al.*, 2013: 75).

Menurut kerangka kerjasama HSCC, Perdana Menteri Turki dan Irak diharapkan untuk bertemu setahun sekali. Sedangkan, pada tingkat ministerial, dilaksanakan pertemuan sebanyak tiga kali dalam setahun dan empat kali setahun untuk delegasi teknis (Scheumann, 2013: 290). Pada pertemuan HSCC tahun 2009, Turki dan Irak menandatangani *Memoranda of Understandings* (MoU) yang salah satu isinya membahas air Sungai Tigris dan Efrat, meski dalam tidak disebutkan secara eksplisit. MoU tersebut ditandatangani oleh *Iraqi Ministry of Water Resources* dan *Turkish Ministry of Environment and Forestry* (Kibaroglu *et al.*, 2013: 75). MoU yang ada memiliki tujuan dalam meningkatkan kerjasama, menginisiasi program edukasi tentang air, serta pengawasan dan pertukaran informasi terkait dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air (Kirschner dan Tiroch, 2012: 351).

2.2.5 Dampak Pembendungan Hulu Sungai terhadap Negara Hilir Sungai Tigris dan Efrat

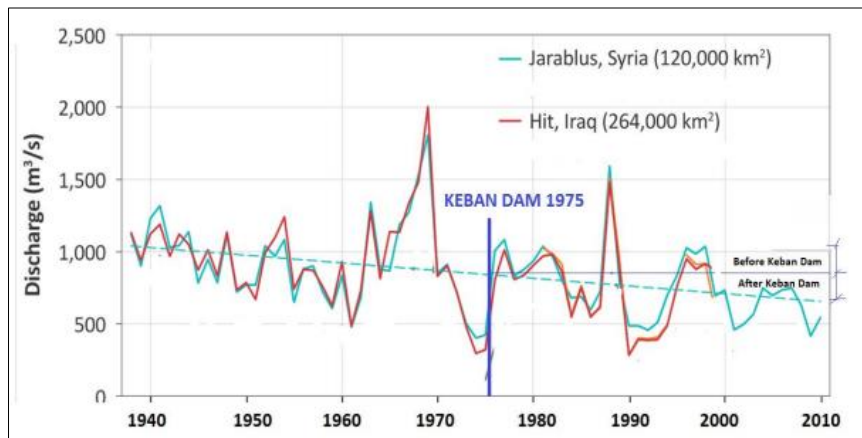
Pembendungan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh negara untuk menjamin ketersediaan air mereka. Berada di kawasan dengan iklim semi kering hingga kering, membuat Turki, Suriah, dan Irak berusaha memaksimalkan pemanfaatan air mereka dengan mendirikan bendungan di sepanjang aliran Sungai Tigris dan Efrat. Sayangnya, ketiadaan perjanjian atau mekanisme yang mengatur terkait pemanfaatan air Sungai Tigris dan Efrat membuat ketiga negara melakukan pembangunan bendungan secara unilateral, yang mana ternyata menimbulkan dampak berkurangnya volume air sungai secara drastis serta dampak lingkungan

akibat pencemaran.

Terletak di hulu Sungai Tigris dan Efrat, pemanfaatan air sungai yang dilakukan oleh Turki dengan membangun GAP, sebuah proyek hidrologi berkelanjutan di kawasan Anatolia Tenggara, menimbulkan dampak negatif pada Suriah terlebih lagi Irak yang letaknya berada di hilir sungai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Ansari dan Adamo (2018), setelah proyek GAP usai, setidaknya 80% air Sungai Efrat akan berada di bawah kontrol Turki dan ketika Bendungan Illisu, yang merupakan bendungan terbesar proyek GAP di Sungai Tigris, selesai dibangun, 47% aliran Sungai Tigris akan berkurang.

Penurunan jumlah volume air Sungai Efrat sudah dapat terlihat sejak Turki mulai membangun Bendungan Keban pada tahun 1970-an. Hal ini terlihat pada gambar yang menunjukkan grafik jumlah air yang memasuki perbatasan Turki-Suriah dan Suriah-Irak, yang mana mengalami tren penurunan secara keseluruhan pada periode tahun 1940-2010. Sebelum pembangunan Bendungan Keban, rata-rata aliran tahunan air Sungai Efrat yang masuk ke perbatasan Suriah mencapai sekitar 30 miliar m³/tahun, kemudian berkurang menjadi 22,8 miliar m³/tahun pasca pembangunan Bendungan Keban.

Gambar 2.4 Rata-Rata Tahunan Aliran Sungai Efrat tahun 1940-2010



Sumber: (Yıldız, 2016: 285)

Dilaporkan pula bahwa sejak tahun 1990, Suriah dan Irak mengalami kehilangan air sebanyak 40% dan 85% masing-masing. Suriah diperkirakan telah kehilangan 9 miliar m^3 air, dari yang sebelumnya 21 miliar m^3 /tahun menjadi 12 miliar m^3 /tahun. Kondisi yang lebih parah terjadi di Irak, dimana sebelumnya mereka memiliki 29 miliar m^3 /tahun, di tahun 2018 hanya memiliki 4,4 miliar m^3 /tahun (Al-Ansari dan Adamo, 2018: 307).

Sebagai negara hilir sungai, tentunya Irak merupakan negara yang merasakan dampak lebih berat, mengingat di sepanjang aliran sungai sudah banyak upaya pembendungan oleh Turki dan Suriah. Berkurangnya volume air Sungai Tigris dan Efrat bagi negara hilir menimbulkan dampak negatif seperti masalah pada sektor agrikultur, listrik, bahkan hingga kesehatan. Pada sektor agrikultur misalnya, dimana Irak mengairi lahan pertanian lima kali lebih besar dari Suriah dan sepuluh kali lebih besar dari Turki (Ozkahraman, 2017: 418). Secara keseluruhan kebutuhan air Irak berkisar antara 75 sampai 81 miliar m^3 /tahun. Di Irak, masyarakatnya hanya bisa menggunakan 50% dari 3,5 juta ha lahan pertanian yang tersedia karena terbatasnya ketersediaan air untuk irigasi. Sebanyak 50% lahan pertanian yang dapat ditanami setidaknya membutuhkan air sebanyak 22 hingga 39 miliar m^3 /tahun untuk

dialokasikan pada sistem irigasi pertanian (Al-Ansari dan Adamo, 2018:310). Untuk menanami lahan pertanian secara keseluruhan dibutuhkan air sebanyak 50 miliar m^3 /tahun, yang mana hal itu susah diwujudkan mengingat kebutuhan air di sektor-sektor lainnya. Mengacu pada data yang didapatkan dari pemerintah Irak, studi teknis yang dilakukan menunjukkan bahwa kehilangan 1 miliar m^3 dapat menyebabkan 62.500 ha lahan pertanian tidak dapat ditanami. Lahan pertanian yang tidak berfungsi ini kemudian menyebabkan masalah ekonomi serta masalah pangan di Irak (OIEau, 2014: 21).

Tak hanya faktor irigasi saja, berkurangnya volume air juga dapat menimbulkan tingginya tingkat garam atau tingkat salinitas pada air. Disamping itu akibat penggunaan GAP sebagai sumber irigasi juga berpengaruh terhadap kualitas air Sungai Tigris dan Efrat. Di Irak sendiri, mereka telah kehilangan 50% dari kapasitas produksi agrikulturnya akibat tingginya salinitas air (von Lossow, 2018: 2). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Al-Ansari tahun 2019, diketahui bahwa salinitas air Sungai Tigris kian meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini disebabkan oleh pembuangan limbah agrikultur dan industri yang tidak diolah ke aliran sungai serta pengaruh perubahan iklim. Aktivitas agrikultur yang dilakukan di sepanjang Sungai Tigris, memperburuk kualitas air Sungai Tigris dan Efrat dengan adanya pembuangan limbah agrikultur yang tidak diolah kembali. Padahal limbah agrikultur tersebut mengandung pestisida, pupuk serta garam (Bachmann et al., 2019: 4). Akibatnya, terjadi pencemaran sepanjang aliran sungai dari hulu ke hilir yang menurunkan kualitas air di Sungai Tigris. Penurunan kualitas air di Sungai Tigris ditandai dengan meningkatnya salinitas. Di hulu sungai, yaitu Turki, pembangunan sistem irigasi dan aktivitas industri berdampak pada kualitas air Sungai Tigris yang diterima oleh negara-negara di bawahnya.

Data pada tahun 2011 menunjukkan salinitas air Sungai Tigris semakin tinggi seiring dengan semakin dekatnya aliran Sungai Tigris dengan muaranya. Air Sungai Tigris yang masuk diperbatasan Suriah-Irak, yaitu Mosul, konsentrasi total zat terlarut dalam airnya berada di angka 300 ppm, kemudian naik ke 460 ppm saat mendekati Baghdad. Saat tiba di Kut City, konsentrasi total zat terlarut dalam airnya sebesar 560 ppm dan 650 ppm ketika sampai di Amarah City. Pada tahun 2015 dan 2016, konsentrasi total zat terlarut dalam airnya di daerah Baghdad telah menyentuh angka 1255 ppm (Al-Ansari et al., 2019: 78). Kondisi tersebut membuat air Sungai Tigris sudah tidak cocok lagi untuk aktivitas irigasi dan dikonsumsi (Al-Ansari et al., 2018: 98).

Sedangkan pada Sungai Efrat, konsentrasi total zat terlarut dalam airnya jauh lebih tinggi. Hal ini tak lain dipengaruhi oleh pemanfaatan Sungai Efrat yang jauh lebih besar dari Sungai Tigris. Sama halnya dengan Sungai Tigris, kualitas air Sungai Efrat kian memburuk seiring mendekat ke arah muaranya. Di Turki, kualitas air Sungai Efrat masih dapat diterima untuk aktivitas agrikultur. Namun, ketika aliran air tersebut masuk ke wilayah Suriah, kualitas air Sungai Efrat sudah tak lagi sesuai dengan standar air yang dapat digunakan untuk irigasi. Terlebih lagi saat air sudah berada di daerah hilir sungai. Dilaporkan pada tahun 2015 dan 2016, tingkat konsentrasi total zat terlarut dalam air Sungai Efrat bahkan bisa menyentuh angka 3000 ppm (Al-Ansari et al., 2018:102).

Berdasarkan EPA Secondary Drinking Water Regulation, standar air yang layak dikonsumsi adalah air yang memiliki konsentrasi total zat terlarut dalam air berkisar antara 300-500 ppm. Air yang memiliki konsentrasi total zat terlarut sebesar 600-900 ppm dikatakan kurang ideal untuk dikonsumsi. Sedangkan, pada kisaran angka 1000-2000 ppm air tersebut tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi dan air yang memiliki konsentrasi total zat terlarut pada angka lebih dari 2000 ppm dinyatakan tidak aman dikonsumsi maupun untuk irigasi (Adamo, Al-ansari dan Sissakian, 2020: 59).

Berkurangnya volume air dan tingginya salinitas pada air juga menyebabkan masalah kesehatan. Mengutip dari tulisan *Human Rights Watch*, dalam sektor kesehatan, dampak berkurangnya volume air yang masuk ke wilayah Irak begitu terasa di Kota Basra, sebuah kota yang terletak di muara Sungai Tigris dan Efrat. Pada Musim Panas tahun 2018, kota tersebut mengalami bencana kesehatan dimana diperkirakan sebanyak 118.000 orang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengonsumsi air yang kualitasnya tidak baik. Sebagian besar pasien dilaporkan terkena diare, muntah, dan sakit perut. Penurunan kualitas air ini tak lain disebabkan oleh berkurangnya volume air yang ada di Sungai Tigris dan Efrat yang turut menekan volume air masuk ke Shatt Al-Arab. Penurunan volume air kemudian akan meningkatkan kadar limbah industri dan pertanian serta salinitas air. Menurut PBB, kualitas air yang buruk di Kota Basra juga telah membuat 4.000 orang harus meninggalkan tempat tersebut (Human Rights Watch, 2019:1).

Meski secara teknis Suriah tidak berada di daerah hilir sungai, melainkan berada di posisi tengah aliran sungai. Suriah juga turut terkena dampak dari berkurangnya volume Sungai Efrat serta meningkatnya salinitas air yang masuk ke wilayahnya. Data pada tahun 1989 menunjukkan bahwa 6000 ha lahan terpengaruh oleh salinisasi, sedangkan 5000 ha diantaranya telah ditinggalkan akibat masalah salinitas parah. Sayangnya, perkembangan data terbaru masih sulit didapatkan (Adamo, Al-ansari dan Sissakian, 2020: 59).

Berkurangnya volume air di Suriah juga turut berimbas pada pembangkit listrik tenaga air mereka, dimana dengan berkurangnya volume air yang mengalir melalui Bendungan Tishreen dan Tabqa secara signifikan dapat mempengaruhi kapasitas produksi energi yang dihasilkan (OCHA, 2021: 1). Dipertengahan tahun 2020, Bendungan Tishreen hanya memperoleh aliran air sebanyak 200 m³/detik yang membuat wilayah Utara Suriah mengalami kesulitan listrik. Dilaporkan oleh VOA, menurut salah satu insinyur yang bertugas di Bendungan Tishreen, aliran air yang mereka terima hanya mampu menghasilkan 70 megawatt listrik atau setara dengan 10% dari jumlah permintaan di wilayah Utara Suriah. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang tinggal disana hanya mendapatkan aliran listrik selama 6 jam per hari (VOA, 2020: 1). Selain masalah listrik, kekurangan air terutama di kawasan Utara Suriah menyebabkan berbagai macam penyakit akibatnya buruknya kualitas air. Terlebih lagi ketika pandemic COVID-19 berlangsung pada puncaknya, dimana sebagian besar masyarakatnya kesulitan memperoleh air untuk sanitasi, yang mana merupakan salah satu kunci utama pencegahan penularan virus tersebut (VOA, 2021: 1).

2.3 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat terlihat peran strategis Sungai Tigris dan Efrat pada masa awal Mesopotamia Kuno hingga Kesultanan Utsmaniyah berfokus pada sektor agrikultur yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakatnya. Terlepas dari itu, peran Sungai Tigris dan Efrat jugadapat ditemukan dalam sektor keamanan dan pertahanan suatu bangsa maupun kesultanan. Pasca berakhirnya Perang Dunia I, dengan terbentuknya negara-negaramodern seperti Turki, Suriah, dan Irak, peran Sungai Tigris dan Efrat masih sangatsignifikan bahkan terus berkembang. Ketergantungan masyarakat pada sektor agrikultur serta upaya modernisasi yang memerlukan sumber daya air, menjadikan Sungai Tigris dan Efrat sangat berpengaruh dalam ekonomi, politik, dan stabilitas keamanan dalam negeri masing-masing negara.

Di ranah internasional, peran Sungai Tigris dan Efrat pada kawasan Mesopotamia telah mempengaruhi dinamika hubungan antar negara, akibat penggunaan dan pemanfaatan Sungai Tigris dan Efrat bersama. Telah ditemukan pula upaya negara untuk menyelesaikan masalah pemanfaatan air sungai, akan tetapi hingga saat ini belum terdapat kerangka khusus yang diperuntukkan mengelola masalah Sungai Tigris dan Efrat. Berangkat dari situ, pada bab selanjutnya, akan dibahas penyebab tidak tercapai perjanjian pembagian air antaranegara tepi Sungai Tigris dan Efrat.